

Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan *Rational Choice Theory*¹

Mohammad Supriyadi

Peneliti di Lembaga ConcerN Strategic Think Tank

e-mail: supri.concern@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini memberikan gambaran runtuhnya pengaruh isu primordialisme di ruang publik dan digantikan dengan kearifan konvensional. Penelitian ini mengambil aspek pengaruh isu SARA pada aspek rasionalitas pemilih. Penulis menemukan beberapa aspek yang mendukung kesimpulan penelitian, antara lain; bahwa isu SARA tidak terlalu direspek pemilih rasional. Pemilih rasional lebih melihat masalah yang ada dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya. Di lain pihak, emosi antusias terhadap isu etnisitas akan memantabkan pilihan politik terhadap pemilih etnis minoritas, sebagai bentuk penguatan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional (*rational choice theory*), penulis melihat bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional (*rational choice*), menentukan pilihan berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (*maximizing benefit*). Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track record kandidat.

Kata kunci: SARA, Politisasi, Rational Choice

Pendahuluan

Perdebatan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada ruang publik, menjadi kajian yang menarik perhatian loyalis negara maupun loyalis agama. Kajian yang lebih spesifik dalam perdebatan modern dengan memunculkan istilah “politisasi agama” (*politicization of religion*) yang ramai dibicarakan dalam pentas kajian nasional-internasional. Semua itu merupakan bentuk penguatan identitas *socio-*

¹ Tulisan ini merupakan kesimpulan besar dari buku “Demokrasi, Pemilu dan Isu SARA” (Jakarta: Pensil 324, 2014) yang dibukukan dari karya akademik magister peneliti.

religious. Penguatan identitas *socio-religious* sudah ada sejak manusia mulai berinteraksi dengan lainnya. Kerangka kajian tentang politisasi agama awalnya bermuara dari perdebatan klasik antara agama (*al-din*) dan negara (*al-daulah*) dalam kajian politik Islam (*al-islam al-shiyasiy* atau *siyasa syar'iyah*) yang terus berkembang sampai saat ini.

Hal ini semakin jelas pada masa transisi politik multikultural yang telah memperkuat paradigma etnosentrisme politik—mengggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sebagai tolok ukur untuk menilai kelompok lain. Munculnya gerakan etnosentrisme di Indonesia paling nampak bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Bentuk dari etnosentrisme tersebut dengan munculnya gerakan islamisasi dan kristenisasi.² Akhir pemerintahan Orde Baru menjelang transisi reformasi, gerakan islamisasi telah melahirkan ketegangan antara masyarakat Muslim dan Kristen. Ketegangan itu terjadi karena adanya diskriminasi pemerintahan Soeharto terhadap masyarakat Kristen dengan adanya upaya peminggiran daripada kelompok Muslim. Hal ini terlihat dengan didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), secara tidak langsung mempunyai afiliasi dengan penguasa Orde Baru.³

Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998, memberi kesempatan dan peluang terhadap hadirnya dinamika kultur politik yang kembali memainkan peran masyarakat sipil (*civil society*) sebagai ujung tombak perubahan politik di Indonesia. Keterbukaan ruang politik *civil society* melalui hak kesamaan atas berserikat yang merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan bentuk dari demokrasi partisipatoris. Akan tetapi, peran tersebut masih dimaknai sebatas menggalang “kekuatan” dalam berpolitik. Oleh karena itu menjadikan perilaku “tarik ulur” kepentingan politik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lainnya, dengan menggunakan media atau alat yang dianggap mempunyai kekuatan untuk menduduki kekuasaan politik.

Salah satu media atau alat politik yang diasumsikan mempunyai kekuatan (*power*) di tengah heterogenitas masyarakat adalah menonjolkan paradigma primordialisme.⁴ Yehouda memberikan penjelasan bahwa

² Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004), 146.

³ Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict*, 146.

⁴ Isu agama sering dibicarakan daripada komponen SARA lainnya dengan lahirnya istilah “politisasi agama” (*politicization of religion*). Apalagi di daerah-daerah yang dibidang religius, peran agama mampu menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Clifford Geertz sendiri menemukan definisi yang otentik terhadap agama karena melakukan penelitian di Jawa. Menurut Geertz agama dimaknai sebagai simbol yang berperan untuk membangun

primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.⁵ Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang mendarah daging (*internalized value*) dan sangatlah susah untuk berubah dan cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Terdapat dua jenis etnosentris yaitu: *pertama*, etnosentris fleksibel yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri tetapi juga sudut pandang budaya lain. *Kedua*, etnosentris infleksibel yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain. Bagian kedua ini lebih mengarah pada lahirnya isu SARA.

Isu SARA dalam kehidupan masyarakat multi-religius, menempati diferensiasi politik yang menyediakan isu agama dan etnik pada tempat yang lebih sempit, tetapi jelas dalam sistem sosiokultural.⁶ Aktualisasi agama—*term* yang khusus dari isu SARA—dan politik sudah terjadi sejak masa klasik sampai pada post-modern, bahkan sampai sekarang dengan diskursus yang berbeda.⁷ Gerakan post-modern lahir pada tahun

suasana yang kuat, pervasif dan tahan lama dalam diri manusia dengan cara merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membungkus konsepsi-konsepsi itu dengan fakta. Lihat Daniel L. Pals, *Eight Theories of Religion* (Lahore: Oxford University Press, 1996), 414. Robert memberikan ilustrasi bahwa, agama dapat dipolitisir menjadi pembunuh ideologi pembunuh dan agama “virtual” lihat, Robert C. Trundle, “America’s Religion Versus Religion in America: A Philosophic Profile,” *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, vol. 11, issue 33 (2012): 3-20.

⁵ Yehouda A. Shenhav, *The Arab Jews: A Postcolonial Reading of Nationalism, Religion, and Ethnicity* (California: Stanford University Press, 2006), 145.

⁶ Uta Gerhardt, *The Social Thought of Talcott Parsons: Methodology and American Ethos* (USA: Ashgate Publishing Ltd, 2011), 56.

⁷ Perdebatan tersebut bermula dari perdebatan hubungan agama (*religius*) dan negara (*state*) yang melahirkan tiga golongan: sekulerisme, simbiotisme dan integralistik. Hal ini mengalami transformasi perdebatan tidak lagi dalam perdebatan identitas kenegaraan, tapi sudah masuk dalam perdebatan kekuatan atau kelemahan agama dalam menjadi “jargon” politik, atau lebih dikenal dengan politisasi agama. Kondisi atau corak komunikasi politik tersebut juga terjadi di negara religious-sekuler, antara lain; Sudan, India, Amerika, Malaysia dan lain-lain. Lihat Matthew Kustenbauder, “The Politicization Of Religious Identity In Sudan, With Special Reference to Oral Histories of The Sudanese

1960-an, sebagai respon terhadap kekecewaan janji-janji gerakan modern yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan bersama. Gerakan post-modern dengan konkret menunjukkan adanya kepanikan terhadap gerakan modern dengan menggelar aksi di St. Louis, Amerika Serikat. Post-modern membantah tentang superioritas masa kini atas masa lampau. Karena itulah gerakan post-modern kembali membangkitkan relevansi nilai-nilai tradisional suci (keagamaan) terhadap kehidupan manusia. Gerakan modernis selama ini tidak menganggap adanya relevansi nilai-nilai tradisional suci dalam dinamika kehidupan yang terjadi. Bangkitnya relevansi keagamaan di ruang publik melahirkan kembali gerakan-gerakan islamisme di beberapa negara Muslim.⁸

Pada akhir abad 20, yang ditandai dengan berakhirnya kolonialisme Barat, di negara-negara Muslim (Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Indonesia dan Aljazair), mengalami kesulitan dengan lahirnya kembali gerakan-gerakan islamisme dalam sistem kenegaraan sebagai bentuk kuatnya ideologi pergerakan politik Islam. Lahirnya kembali gerakan islamisme, membangkitkan kembali konsep-konsep tentang radikalisme yang berujung pada konflik politik antara loyalis Islam (otoritas agama) dengan loyalis negara (otoritas negara). Dari fenomena tersebut, terbangunlah kajian yang sistematis antara isu SARA dan politik yang terus berkembang sampai saat ini dengan adanya transformasi ke arah dinamika isu kontemporer.⁹

Diskursus agama dan politik tidak hanya terjadi pada penentuan konstitusi negara (*state constitution*)¹⁰ atau untuk menentukan paradigma hubungan agama dan negara dalam konteks sekularistik, integralistik dan

Diaspora In America," *International Studies in Religion and Society Journal*, vol. 15 (2012): 397-424, <http://dash.harvard.edu/handle/1/10125934> (diakses: 30 April, 2013, 11:38 PM).

⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 50-51.

⁹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina dan LSI, 2009), 2-3.

¹⁰ Dalam kejian politik Islam, konsepsi negara mengalami perdebatan yang sangat panjang. Perdebatan konsepsi negara (*daulah*) yang dibangun Nabi Muhammad beserta *Muhajjirin* di Madinah. Sebagian ada yang mengartikan, bahwa konsep negara yang didirikan Nabi Muhammad merupakan bentuk konsep *daulah* sebagai *state*, tapi ada juga yang berpendapat bahwa *daulah* yang dibangun Nabi Muhammad tersebut tidak seperti halnya negara pada masa sekarang, karena belum adanya konstitusi, perundang-undangan, ketetapan hukum dan masih mengacu pada pendapat Nabi Muhammad sebagai *ulil amri*, istilah yang paling tepat adalah "*chiefdom*". Salah satu ciri umum *chiefdom* adalah adanya pusat peribadatan dan upacara permanen yang menjadi titik pusat kegiatan sosial dan politik warganya. Jumlah populasi penduduknya pada waktu itu berkisar 5.000 jiwa. Baca Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 59.

simbiotik. Akan tetapi dalam kajian politik Islam kontemporer, diskursus agama dan politik lebih pada konteks isu primordialisme yang terjadi dalam setiap kepentingan politik.¹¹ Bassam Tibi dalam bukunya *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder* mempunyai kerangka sudut pandang yang negatif dalam memaknai isu primordialisme di ruang publik. Tibi mewacanakan bahwa, isu primordialisme dalam politik hanya upaya memanipulasi pemahaman atau pengetahuan keagamaan. Lalu dari pemahaman tersebut diekspresikan dalam bentuk propaganda, indoktrinasi, kampanye dan sosialisasi untuk membentuk pemahaman sebagai ajaran agama atau bentuk dari nilai-nilai keetnisan.¹²

Penguatan isu SARA di ruang publik, tidak bisa dilepaskan dari tekanan untuk memengaruhi konsensus keagamaan dan keetnisan. Pengaruh konsesus tersebut sebagai upaya memasukkan kepentingan fanatis primordialisme ke arah agenda politik guna memengaruhi opini dan konsepsi masyarakat.¹³ Muhammad Sa'îd al Asmawi dalam *al-Islam al-Shiyasi* mengatakan bahwa, sebagian manusia menghendaki agama menjadi kekuatan politik, sedangkan Allah hanya menempatkan Islam sebagai agama (*al-din*).¹⁴ Dalam konteks ini, al Asmawi memberikan sebuah pandangan bahwa, agama dalam praksisnya bersifat universal bukan parsial untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuatan kekuasaan. Seperti halnya yang terjadi pada diskursus politik Islam dalam sistem khalifah pasca meninggalnya Nabi Muhammad.¹⁵

Dalam sejarah politik Islam, perilaku politik yang mengarah pada isu SARA sudah terjadi sejak awal perkembangan Islam (*sadrul islam*). Para raja (*imamah*) dan *khalifah* berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Salah satunya cara yang sering digunakan adalah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan Hadits secara politis sesuai dengan kepentingan politiknya. Di antaranya adalah ayat yang berbunyi "*taatlah kepada Allah dan para penguasa di antara kalian*". Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, penguasa atau pemimpin harus dipatuhi apa dan bagaimana

¹¹ Ahmed Vaezi, "Sy'ah Political Thought", dalam Ali Syahab, *Agama Politik: Nalar Politik Islam* (Jakarta: Citra, 2006), 7. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), 43.

¹² Definisi tersebut sama halnya kalau diterapkan pada *term* yang luas yaitu SARA. Baca Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder* (London: Universty Of California Press, 1998), 35. Lihat Bassam Tibi, "The Politicization of Islam and Islamism in the Context of Global Religious Fundamentalism," *Journal of the Middle East and Africa*, Vol. 1 (Oktober 2011): 153-170.

¹³ Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism*, 35.

¹⁴ "*arâdallâhu li al-Islâmi an yakûna dînan, wa arâda bihi al-nâs an yakûna siyâsatan*"

¹⁵ Muhammad Said al-Asymawi, *Al-Islâm al-Siyâsî* (Lebanon: Sina lil-Nashr; al-Tabah, 1987), 54.

pun cara mereka memimpin. Ayat ini kemudian oleh para kritikus tafsir disebut “*ayat al-umara*” (ayatnya para penguasa). Di samping politisasi tafsir *ayat al-umara*, juga terjadi sentimen etnis (*kabilah* atau *bari*) antara Bani Quraisy, Bani Kalb, Bani Hanifah dan Bani Amir bin Sha’sha’ah atau antara *kabilah muhajirin* dengan *anshar* dalam bidang ekonomi (*tijarah* atau *ghanimah*), politik dan sosial-budaya.¹⁶

Dari situlah timbul perpecahan di antara kelompok (*kabilah*) satu dengan lainnya. Kepentingan tersebut hanya untuk mempertahankan kepentingan politik masing-masing *kabilah*. Para elit politik di ranah kekhalifahan tidak lagi mempertimbangan realita sosio-politik, bahwa Islam adalah agama yang multiinterpretatif, dengan memberikan ruang pada tafsir lainnya untuk memberikan penafsiran secara luas (*a polyinterpretable religion*) terhadap suatu problem yang terjadi di antara *kabilah*.¹⁷

Perkembangan isu etnis dan agama dalam nuansa politik di Indonesia mengalami empat *fase* yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan kondisi sosio-kultural dan kepentingan politik antara masa ke masa, yaitu: pra-kemerdekaan (Hindu-Budha, Hindia-Belanda dan Jepang), transisi kemerdekaan, Orde Baru dan Orde Reformasi. Perkembangan dinamika politik di Indonesia, tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik yang berbeda antarmasa ke masa. Juga adanya pengaruh antarkelas sosial, yaitu; santri dan abangan, atau priyayi dan abangan. Lebih signifikan lagi antara Muslim pribumi dengan penjajah. Gejolak politik yang terus mengalami perubahan antara penjajah dengan pribumi, antara Islam dengan Kristen dan gejolak masa penjajahan yang cukup panjang, berimplementasi pada perubahan kehidupan politik secara menyeluruh.¹⁸

¹⁶ http://www.sunanampel.ac.id/en/index.php?option=com_content&view=article&id=346%3AHubungan-antara-politik-dan-agama&catid=1%3ALatest-news&lang=en (diakses 30 Maret, 2012, 17:13 PM). Politisasi agama juga berkembang dari masa permulaan Islam sampai pada post-modern. Dimana setiap perilaku politik yang berhubungan dengan adanya upaya untuk memobilisasi massa, maka agama menjadi jargon untuk melegitimasi komunikasi politiknya. Dalam penelitian terbaru, politisasi agama juga terjadi pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kebijakan politik pemerintahan Amerika Serikat, menjauhkan sistem pemerintahan dengan agama (*sekuler*).

¹⁷ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, 5.

¹⁸ Pengaruh agama dan politik dalam sejarah bangsa Indonesia juga tidak jauh dengan dari pengaruh pemikiran Timur Tengah. Pengeruh agama dan politik mengalami pergeseran fungsi, kalau pada era pra dan pasca kemerdekaan, pengaruh agama dan politik masuk dalam ranah untuk menentukan status negara pasca kemerdekaan 1945. Akan tetapi, perdebatan agama dan politik semakin bergeser sampai pada akhirnya istilah politisasi agama.

Walaupun Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi semua kebijakan politiknya tidak bisa lepas dari aspirasi rakyat Muslim dan mayoritas keetnisan, misalnya: etnis Jawa. Aspirasi rakyat muslim terlihat dalam gerakan solidaritas saat terjadinya konflik politik di negara-negara Islam (Afganistan, Syiria, Iran, Irak dan lain-lain) yang melibatkan intervensi negara-negara Barat. Aksi itu berbentuk demonstrasi di kedutaan negara yang bersangkutan di Jakarta, bakar bendera negara, memblokir jalan, memboikot produk-produk luar negeri dan semacamnya.

Singkatnya, para pakar sejarah mengemukakan bahwa, perkembangan Islam di Indonesia mengalami transformasi tiga gelombang budaya besar yang masuk ke kepulauan Nusantara sepanjang sejarah. Gelombang pertama adalah gelombang budaya dan agama Hindu-Budha yang cukup lama mendominasi kehidupan keagamaan dan kerohanian di Nusantara. Pengaruh yang paling besar dengan masa yang cukup lama itu didukung oleh kerajaan-kerajaan yang berpusat di bagian Tengah dan Selatan Pulau Sumatera, dan Jawa bagian Tengah dan Timur. Bekas-bekas rekap sejarah masih nampak dengan jelas atas pengaruh agama dan budaya di Indonesia sampai sekarang di Pulau Bali. Semuanya merupakan bentuk akulturasi agama dan budaya lokal.¹⁹

Setelah gelombang pertama, pengaruh Hindu-Budha ada pada perkembangan budaya lokal. Dua gelombang lain tampaknya sudah ditakdirkan untuk memainkan peran sejarah Indonesia modern, sesudah runtuhnya Hindu-Budha. Pasca runtuhnya gelombang Hindu-Budha yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera, menjadi awal munculnya gelombang Islam dan Kristen. Islam lebih banyak memainkan peran perekonomian dengan cara berdagang, di samping menyebarkan agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat pribumi.²⁰

Hal ini berbeda dengan rekap sejarah Kristen ke Nusantara. Gelombang Kristen ke nusantara secara terang-terangan melakukan gerakan kristenisasi dengan dukungan negara-negara Barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda dan Ingggris. Sebaliknya, gelombang Islam datang bersamaan dengan para pedagang-pedagang Muslim yang tidak mendapat dukungan dari negara-negara Islam di belakangnya. Akan tetapi, dengan kesantunan serta kerukunan antar pedagang Muslim, membuat penduduk pribumi tertarik dengan perilaku dan sikap pedagang Muslim Timur

¹⁹ A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi* (Jakarta: Pencil 324, 2004), 257-258.

²⁰ A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam*, 302-304.

Tengah yang mampu membangun sikap aktualisasi dengan penduduk pribumi.²¹

Pada masa pra kemerdekaan, diskursus perdebatan Islam dan politik masuk dalam gerakan-gerakan nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini tampak lahirnya gerakan Serikat Islam (SI) – sebelumnya bernama Serikat Dagang Indonesia (SDI) – yang merupakan gerakan politik untuk menuntut propaganda menuju keutuhan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan.²² Islam dan politik pada pra kemerdekaan melewati dualisme kondisi politik yang berbeda. Pada masa penjajahan Belanda, gerakan Islam politik pribumi sebagai ancaman kekuatan kolonialisme penjajah. Belanda menekan gerakan Islam dengan tidak melibatkan Muslim pribumi dalam menjalankan roda pemerintahan. Konsekuensi Islam dan politik pada masa kolonialisme Belanda, berbeda dengan pada masa penjajahan kolonialisme Jepang.

Jepang berhasil membaca peta politik Islam, dengan mengadopsi peran politik Islam dalam masa pemerintahan Hindia-Belanda. Jepang memanfaatkan gerakan politik Islam pribumi untuk menjadi kekuatan kekuasaan dalam melancarkan misi penjajahan. Jepang menyadari hadirnya kekuatan gerakan politik Islam yang ada di dalam organisasi Muslim pribumi dengan berdirinya beberapa organisasi dan partai politik, yaitu : Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII), Al Wasliyah di Medan, Mathla'ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya.²³

Pada transisi kemerdekaan, akumulasi gerakan politik Islam mempunyai peran politik yang berbeda pada masa dualisme pemerintahan – kolonialisme Belanda dan Jepang. Pasca Kemerdekaan 1945, perdebatan politik Islam terjadi pada penentuan bentuk konstitusi bangsa Indonesia, antara pandangan “negara sekuler” atau “negara Islam”.²⁴ Kedua pendapat itu terlihat misalnya sebelum kemerdekaan dalam polemik antara kelompok Soekarno dengan kelompok Agus Salim.

²¹ A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam*, 302-304.

²² M. Abdul Karim, *Islam Dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Perjuangan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI* (Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005), 27. Baca Sukron Kamil, *Islam dan Politik: Islam dan Negara, Dakwah dan politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, NII, MII dan Perda Syariah* (Jakarta: PSIA UIN Jakarta, 2013), 4-5.

²³ Harry J Benda, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dakhidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 216.

²⁴ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, LSI dan Prenada Media Group, 2009), 5.

Kemudian dengan M. Natsir di akhir tahun 1930-an dan awal 1940-an. Diskusi dan perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, persoalan itu juga terangkat kembali di dalam sidang-sidang konstitusi hasil Pemilu 1955 yang berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali pada norma-norma konstitusi kenegaraan UUD 1945.²⁵

Perkembangan politik Islam mengalami pengaruh yang sangat besar sampai pada pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan Orde Baru, sistem pemerintahan lebih menganut sistem politik otoriteristik dan militeristik.²⁶ Kekuatan pemerintah rezim Soeharto mendapat dukungan penuh dari kontrol militer dan mampu menekan gerakan politik Islam yang dianggap mengancam kekuatan rezim. Kembalinya politik Belanda, pada politik Orde Baru menganggap gerakan politik Islam sebagai ancaman pemerintahan. Anggapan tersebut mengacu pada masih adanya faksi-faksi gerakan Islam yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam (*teokrasi*).

Pemerintah Orde Baru melancarkan serangan penuh untuk menekan perkembangan politik Islam (*depolitisasi Islam*). Dengan memberlakukan asas tunggal Pancasila. Kalangan umat Islam khususnya keluarga besar eks-Masyumi merasa sangat kecewa atas sikap dan kebijakan pemerintahan Orde Baru pada rentang tahun 70-an. Kebijakan politik Orde Baru telah melarang kehadiran kembali Masyumi, sementara Ali Moertopo dan kawan-kawan selaku *invisible government* melakukan rekayasa politik untuk mengubah status Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai partai politik dengan dukungan penuh ABRI dan birokrat.

Hal lain yang patut dicatat adalah adanya selogan atau doktrin yang disiapkan Ali Moertopo dan kawan-kawan. Selogan tersebut selalu didengung-dengungkan di tengah masyarakat bahwa “politik Islam sangat membahayakan kelangsungan hidup Pancasila”, dengan selogan “*Politik No, Pembangunan Yes.*” Rakyat harus menjadi *floating* massa serta bagi pegawai negeri dan karyawan BUMN berlaku asas kesetiaan mutlak (*monoloyalitas*) kepada Golkar, bukan kepada Bangsa dan Negara. Diskursus Islam dan politik di Indonesia dari masa ke masa dibahas secara mendalam pada bab-bab berikutnya.

²⁵ Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 306.

²⁶ Istilah “otoriterisme militeristik” merupakan pengjawentahan dari sistem Demokrasi Terpimpin. Baca Hermawan Sulistyono, *Lawan: Jejak-Jejak Jalanan Pasca Runtuhnya Soerharto* (Jakarta: Pensil 324, 2010), 34-35.

Pasca lengsernya Presiden Soeharto, pergulatan gerakan politik Islam di Indonesia semakin terbuka. Begitu terbukanya, munculah istilah “politisasi agama”. Tekanan politik Orde Baru selama 62 tahun, membuat agresifisme perkembangan dinamika politik Islam yang beraneka ragam. Mulai dari memasukkan politik Islam pada ranah kepartaian (PKB, PKS, PKU, PBB, PAN dan lain-lain) – partai Islam yang dibentuk pada transisi Orde Reformasi (Pemilu 1999) – dan organisasi non politik sampai pada sikap “politisasi agama” pada setiap pelaksanaan pemilu.²⁷

Di samping sistem politik yang lebih terbuka, Orde Reformasi juga telah mengesahkan UU No. 21 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan secara otonom (otonomi daerah/Otda). Kebijakan otonomi daerah merupakan tindak lanjut dari upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, politik dan sosial-budaya di tingkat daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah lebih tepat dalam mengambil kebijakan di tingkat daerah sesuai keputusan publik.²⁸ Keputusan publik dapat diterima secara luas apabila; *pertama*, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai wujud aspirasi politik masyarakat. *Kedua*, kebijakan publik disusun secara transparan. *Ketiga*, jelasnya akuntabilitas publik. *Keempat*, adanya pengawasan secara langsung atau tidak langsung melalui wadah aspirasi perwakilan rakyat.²⁹

²⁷ Istilah politasi agama tidak hanya muncul dalam pusaran politik pasca Orde Baru. Pada kampanye akhir pemerintahan Orde Baru, politisasi agama sudah terjadi, antara lain, politik untuk menarik simpatisan dari partai lain. PPP partai yang notabennya didominasi ulama dan kalangan pesantren, menyampaikan dalam setiap kampanyenya dengan memanipulasi ayat-ayat Alquran yang menceritakan Adam dan Hawa menjadi ayat politik untuk menjatuhkan Partai Golkar (Golongan Karya) dari simpatisan muslim “*janang dekat-dekat pohon itu*”. Di sisi lain, para ulama simpatisan PPP, mengeluarkan fatwa yang seakan-akan menjadi dasar hukum politik larangan orang Islam untuk memilih PDI (Partai Demokrasi Perjuangan). PDI dianggap sebagai partai yang didominasi kalangan nasionalis “abangan”. Begitu juga, dengan “serangan” politik dari ulama yang “nekat” masuk dalam partai Golkar dan PDI. PPP dianggap partai yang menyebarkan fitnah politik, maka dihimbau untuk tidak memilih PPP, karena fitnah itu sangat dilarang dalam ajaran agama Islam “*al fitnatu asyaddu minal qatli*”.

²⁸ Pada masa Orde Baru, daerah di tingkat provinsi di sebut daerah tingkat I dan daerah di tingkat kabupaten/kota disebut daerah tingkat II. Hal ini dihabus sesuai amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Di Indonesia terdapat tiga jenis sitem pemerintahan di tingkat provinsi; (1) provinsi “biasa”, (2) Daerah Istimewa dan (3) Daerah Khusus Ibu Kota. Setiap provinsi dikepalai Gubernur dengan sistem pemilihan langsung kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta status Gubernur dijabat seorang raja dengan sistem alur politik *monarki absolute*.

²⁹ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI* (Jakarta: LIPI Press, 2004), 42-45.

Momentum pemilu tidak hanya penting bagi proses demokrasi, tetapi juga untuk proses pemerintahan masing-masing *stakeholders* yang bersinergi untuk mencapai tujuan bersama melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Salah satu tugas pemerintah dalam proses politik adalah menciptakan ruang yang kondusif dan fasilitatif bagi warganya agar dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya secara aman, damai dan toleran. Di sisi lain, masyarakat bertindak proaktif dengan melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses tersebut, sehingga tercapai tujuan demokrasi yang mengedepankan transparansi hak-hak *civil society*.

Akan tetapi, selama ini penyelenggaran pemilu langsung, baik pemilihan presiden, legislatif, kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota sampai pada pemilihan kepala desa, masih terdapat permasalahan – Daftar Pemilih Tetap (DPT), independensi lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Panwaslu, Bawaslu dan KPPS), *money politics* – yang berujung pada sentimen antar kelompok dengan memainkan isu primordialisme untuk menjadi *casing* kepentingan politik individual atau kelompok. Hal ini yang terjadi di beberapa pemilukada hampir semuanya terdapat konflik sosial. Begitu juga dengan proses pemilihan yang terjadi pada Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012.³⁰

Pemilukada DKI Jakarta mempunyai kedudukan strategis secara nasional, baik dari sisi ekonomi, politik maupun sosial-budaya. Provinsi Jakarta merupakan pusat pemerintahan, memiliki bentuk otonomi yang khusus dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Kehidupan masyarakat Jakarta yang multikulturalisme dengan keaneka ragam SARA dan penyeteraan pendidikan yang hampir pada level sarjana dengan kemapanan pada sektor pertumbuhan ekonomi, isu SARA masih menjadi pilihan dalam berpolitik.

Begitu juga dengan pengalaman politik, Jakarta sudah mempunyai pengalaman melaksanakan pemilukada langsung yang kedua (2007 dan 2012) selama disahkannya UU Otonomi Daerah. Pasangan Cagub dan Cawagub yang ikut dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012, yaitu: (1) Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara), (2) Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria (Hendarji-Riza), (3) Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), (4) Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (Hidayat-Didik), (5) Faisal Basri-Biem Benyamin (Faisal-Biem) dan (6) Alex Noerdin-Nono

³⁰ Asri Harahap, "Pemilukada DKI Jakarta: Barometer Resolusi Konflik", *Harian Umum Pelita*, 11 Desember 2012, (diakses <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=34173> 11/12/12 10:34 PM).

Sampono (Alex-Nono).³¹ Dalam pemilihan putaran pertama, pasangan Jokowi-Ahok unggul dengan perolehan 1.847.157 suara dan pasangan Foke-Nara dengan 1.476.648 suara.³² Hal ini yang mengantarkan pasangan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok masuk dalam putaran kedua.

Pada putaran kedua yang diikuti pasangan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok, banyak bermunculan isu SARA melalui khutbah-khutbah keagamaan, jejaring sosial; *facebook*, *twitter*, selebaran, SMS dan media komunikasi lainnya.³³ Hasil laporan survei Indonesia Media Monitoring Center (IMMC), perkembangan isu SARA tertinggi terjadi pada masa kampanye pemungutan suara putaran kedua 11 Juli 2012. Hal ini juga dipertegas laporan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah menemukan selebaran, SMS dan BBM, yang telah mendiskreditkan (*black campaign*) pasangan Jokowi-Ahok.

Tingginya sumber daya manusia serta letak demografi Jakarta pada garis metropolitan dengan tingkat ekonomi dan industrialisasi yang semakin maju, isu SARA masih menjadi pilihan untuk menjatuhkan lawan politik (*political opponents*) sebagai langkah strategis meningkatkan elektabilitas kandidat di mata pemilih. Akan tetapi, konspirasi politik SARA yang terjadi dalam Pemilukada DKI Jakarta, berujung pada kekalahan Foke-Nara. Dimana tim sukses dan simpatisannya gencar mendapat serangan SARA kepada pasangan Jokowi-Ahok dengan dukungan mayoritas dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dari segi kehidupan keagamaan, penduduk Jakarta mayoritas Islam dengan pemahaman agama yang memadai. Hal ini didasari dengan banyaknya perkembangan organisasi-organisasi keagamaan—Majlis Rasulullah, FPI, MUI, NU, Muhammadiyah, dan semacamnya. Mengapa isu SARA menjadi bumerang atas kekalahan Foke-Nara dan menjadi umpan balik terhadap kemenangan pasangan Jokowi-Ahok?

Kerangka demikian yang menjadi pemikiran awal untuk meneliti lebih jauh dinamika isu SARA dan politik yang berkembang dalam pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 dalam konteks politik Islam.

³¹ Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Daftar Pasangan Calon Cagub Cawagub DKI Jakarta (Jakarta, KPU, 2012), 10-12.

³² Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, *Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2012* (Jakarta, KPU, 2012), 15-16.

³³ Isu SARA yang terjadi dalam Pemilukada DKI Jakarta sudah terjadi sejak keikutsertaan Ahok sebagai pasangan Cawagub Jokowi. Akan tetapi, dinamika isu SARA paling sering muncul di permukaan publik melalui media cetak, sosial dan alat-alat peraga kampanye setelah pasangan Foke-Nara dinyatakan kalah dengan pasangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama. Pada putaran kedua, destinasi isu SARA semakin besar apalagi bertepatan dengan bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1433 H (*baca bab empat*).

Kemenangan Jokowi-Ahok merupakan potret dari dampak apatisme pemilih terhadap konspirasi SARA atau rasionalitas pemilih lebih condong pada kearifan konvensional (*conventional wisdom*).

Untuk memperoleh kesimpulan akademik yang mendalam terhadap isu tersebut, diperlukan penelitian lapangan (*field research*) dengan model wawancara tokoh, peneliti, akademisi, ketua ormas, tokoh masyarakat yang intens berkomentar terhadap isu SARA dan didukung dengan hasil laporan lembaga survei pada Pemilu 2012 DKI. Baik melalui media massa, atau tulisan-tulisan yang dipadukan dengan menggunakan analisis data untuk mengetahui pola “isu SARA dalam pemilu era otonomi daerah studi atas Pemilu 2012 DKI Jakarta”, pada konteks efektivitas isu SARA untuk memobilisasi massa—memengaruhi rasionalitas pemilih—pada masyarakat perkotaan modern.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada tiga pertanyaan penelitian (*research problem*) yang semuanya terfokus pada penelitian ini. *Pertama*, bagaimana sikap pemilih perkotaan dalam menyikapi isu SARA? *Kedua*, bagaimana proses terbentuknya sikap elektoral pemilih? *Ketiga*, bagaimana efektivitas isu SARA dalam memengaruhi rasionalitas pemilih?.

Diskursus Politisasi Agama dalam *Rational Choice Theory*

Diskursus isu SARA atau yang sudah banyak dikaji pada sisi politisasi agama (*politicization of religion*) mengalami beberapa fase diskursus periodisasi. Mulai perdebatan akademik klasik sampai saat ini. Baik periodisasi yang digunakan sebagai pembatasan kajian atau lebih pada pendekatan perbandingan (*comparative approach*) antar periode.

Banyak para kalangan akademik yang sudah memperdebatkan keeksian pengaruh isu SARA di ruang publik. Dari perdebatan tersebut, menghasilkan kesimpulan penelitian yang berbeda-beda. Sebagai perbandingan literatur kajian akademik, perlu melihat “corak” penelitian yang sudah dilakukan para akademisi sebelumnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan alur pikir penelitian.

Pertama, Pippa Norris dan Ronald Inglehart dalam bukunya *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* telah membantah teori sekularisasi klasik yang dilahirkan pada abad ke-19 oleh Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan Sigmund Freud yang mengatakan, adanya pemudaran pengaruh agama dan mengalami disfungsi dalam masyarakat industri. Teori sekularisasi yang sangat dominan di dunia modern mengatakan bahwa, sepanjang abad

ke-20 keyakinan agama dianggap lenyap dan digantikan dengan kearifan konvensional.³⁴

Norris dalam bukunya tersebut berusaha membantah teori sekularisasi klasik dengan memberikan kesimpulan bahwa, adanya hubungan agama dan politik yang masih relevan dalam memengaruhi semua lini kehidupan. Hal ini tampak dari semakin maraknya gerakan religiusitas di Amerika Serikat dengan banyak munculnya spiritualitas New Age di Eropa Barat, gerakan fundamentalis dan partai keagamaan di dunia Muslim, serta menyeruaknya konflik etno-religius di tingkat internasional.³⁵

Apakah sekularisasi sudah tamat? Jawabnya, tidak. Namun demikian, teori lama tentang sekularisasi mesti ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang banyak menggantungkan pada kemajuan teknologi. Buku ini menyajikan kontroversi teori baru ihwal sekularisasi dengan dukungan fakta-fakta dari hasil survei World Values Survei (WVS) terhadap hampir 80 masyarakat di seluruh dunia. Karya Norris penting bagi siapa pun yang tertarik pada isu-isu agama, sosial, opini publik, perilaku politik, psikologi sosial, hubungan internasional, dan perubahan budaya.³⁶

Kedua, Willie Gin dalam bukunya *Jesus Q. Politician: Explaining the Politicization of Religion in the United States, Australia, and Canada* merupakan karya akademik terbaik yang membuktikan kembali adanya gerakan politisasi agama di negara-negara sekuler. Penelitian tersebut mengambil studi kasus di Amerika Serikat, Australia dan Kanada, sebagai bentuk parameter untuk membuktikan keeksisan *madzhab* sekular. Willie

³⁴ Pippa Norris adalah ilmuwan politik dengan fokus kajian pada demokrasi dan pemerintahan, opini publik dan pemilu, komunikasi politik, dan jender. Saat ini, dia menjabat Direktur Democratic Governance Group di UNDP, Dosen di John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Norris menulis lebih dari 30 buku, antara lain: *Digital Divide and a Virtuous Circle* (buku terbaik bidang komunikasi politik pada The Doris A. Graber Prize 2006); *Radical Right: Voters and Parties in the Electoral Marketplace* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); dan beberapa buku lainnya. Ronald Inglehart adalah ilmuwan politik dari University of Michigan. Ia menekuni riset di bidang perubahan kultural. Profesor Inglehart kini menjabat Direktur World Values Survey, sebuah jaringan survei publik berskala internasional bagi ilmuwan sosial dengan perwakilan nasional di lebih dari 80 masyarakat dunia. Karya-karyanya, antara lain *Modernization and Postmodernization* (1997); *Human Values and Beliefs* (1998); *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World* (2003); *Islam, Gender, Culture, and Democracy* (2004); *Modernization, Cultural Change, and Democracy* (2005).

³⁵ Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (New York: Cambridge University Press, 2004), 36.

³⁶ Pippa Norris dan Ronald Inglehart, *Sacred and Secular*, 45-47.

mengungkapkan bahwa, kelompok Katolik dalam peran politik tidak lepas dari nilai-nilai agama sebagai legitimasi konseptual dan tindakan.³⁷ Tulisan ini membantah para akademisi yang berargumen sebaliknya yang mengatakan bahwa, sudah tidak ada hubungan antara agama dan politik di masa modern. Willie menegaskan, faksi fanatisme agama masih ada dalam tengah-tengah kehidupan negara sekular. Hal ini sebelumnya sudah menjadi perhatian terhadap munculnya faksi SARA dalam negara sekuler.³⁸

Ketiga, David dan Lyman dalam bukunya *Rediscovering the Religious Factor in American Politics* berpendapat bahwa, pengaruh agama dan politik masih dominan dan tidak mengenal waktu. Pergolakan politik di Amerika yang mempercayai paham konstitusi sekularisme, agama masih menjadi incaran para pelaku politik dalam upaya pencitraan dan menjadi panggung untuk mendapatkan simpatisan rakyat. Terlihat pada poling-poling lembaga survei di Amerika pada pemilihan presiden. Lembaga survei tersebut mengedarkan pertanyaan “*apakah Jesus mendukung Obama atau Hillary Rodhan Clinton dalam Pilpres?*”

Keempat, Danoye Ogunto dalam “*Religion and Politics in A Pluralistic Society: the Nigerian Experience.*”³⁹ Pada kehidupan masyarakat Nigeria, agama dan politik mempunyai kepentingan diantara keduanya. Sebagian elit politik dan penguasa Nigeria, memainkan agama dalam ranah kebijakan politik dan pemerintahan. Perilaku sosio-politik menggambarkan bahwa hubungan agama dan politik di Nigeria berjalan secara harmonis dan saling memengaruhi diantara keduanya. Hubungan keduanya – agama dan politik – perjalan efektif akan tetapi keefektifan tersebut tergantung siapa yang akan memerankannya. Oleh karena itu, negara dan politik berkomunikasi secara positif walaupun negara bersifat pluralistik.⁴⁰

³⁷ Willie Gin, “Jesus Q. Politician: Explaining the Politicization of Religion in the United States, Australia, and Canada”, *Working Paper the United States Studies Centre at the University of Sydney* (October 2009): 24-30. Lihat David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, *Rediscovering the Religious Factor in American Politics*, 3-4. Lihat Robert Trundle, “America’s Religion versus Religion in America: A Philosophic Profile”, *Journal for the Study of Religions and Ideologies* Vol. 11, no. 33 (2012): 4-5.

³⁸ Willie Gin, “Jesus Q. Politician: Explaining the Politicization of Religion in the United States, Australia, and Canada”, *Working Paper The United States Studies Centre at The University of Sydney*, 34.

³⁹ Danoye Ogunto, “Religion and Politics in A Pluralistic Society: The Nigerian Experience”, *Journal Politics and Religion-Politologi Des Religions*, Vol. II, No. 2 (2008): 123-129. Lihat Hakim Onapajo, “Politics for God: Religion, Politics and Conflict in Democratic Nigeria”, *The Journal of Pan African Studies*, Vol. 4, No. 9 (January 2012), 42-50.

⁴⁰ Politisasi agama juga terjadi di Pakistan. Menurut Rana Aijaz Ahmad dan Abida Aijaz (2011) “*Commercialization of Religion in Pakistan*” menggambarkan tentang hubungan agama dan politik di dengan studi kasus negara Pakistan. Rana dan Abida; agama di Pakistan

Kelima, selain Danoye, Hakeem Onapajo juga meneliti dinamika hubungan agama dalam politik di Nigeria yang dibukukan dalam "*Politics for God: Religion, Politics and Conflict in Democratic Nigeria*", tulisan ini membuktikan kembalinya peran agama dalam memengaruhi perilaku dan ketetapan politik di Nigeria. Hakeem juga menggambarkan bagaimana agama dan politik bersanding dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk resolusi konflik komunal era Reformasi Nigeria. Falola (1998) mengatakan bahwa, fanatisme agama mendominasi setiap kehidupan masyarakat Nigeria, dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan. Akan tetapi, beberapa kesempatan, agama digunakan sebagai mobilisasi massa untuk kepentingan politik dan kekerasan pasca pemilu. Para tokoh dan lembaga agama memainkan peran untuk masuk dalam ranah politik. Pasca kerusuhan pemilu, lembaga agama mampu menjadi fasilitator perdamaian dari pada menggerakkan konflik komunal.⁴¹

Di sisi lain, ada beberapa aktor akademik yang membantah adanya pengaruh dan fanatisme isu SARA dalam perkembangan dinamika politik modern, antara lain : *pertama*, Haidar Bagir "*Islam dan Politik : Indonesia Menuju Demokrasi Yang Lebih Baik*" dalam tulisan ini Haidar menyajikan perdebatan tentang Islam dan Politik; apakah keniscayaan menegakkan pemerintah merupakan kewajiban keagamaan ataukah suatu kebutuhan yang bersifat rasional? Menurut kaum *Mu'tazilah* dan *Khawarij* dalam alasan yang berbeda dan konsep yang sama bahwa, menegakkan pemerintah merupakan kewajiban keagamaan. Artinya, agama harus ikut campur dalam kebijakan pemerintah agar hasil dari kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan sesuai dengan norma-norma agama Islam.⁴² Berbeda dengan golongan Islam "ortodoks" seperti al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah yang menyikapi perdebatan agama dan politik dalam kehidupan bernegara. Golongan Islam ortodoks lebih memandang

digunakan dipolitisasi dan dikomersialkan untuk melegitimasi kekuasaan penguasa. Rana dan Abida memakai judul "komersialisasi" agama, karena sebagian tokoh agama "menjual belikan" agama sebagai legitimasi partai politik. Akuntabilitas kelas penguasa adalah satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan Pakistan pada menguatkan pondasi kenegaraan di masa depan. Dengan dikte-dikte nilai-nilai agama akan menguatkan kondisi sosial-budaya, politik dan ekonomi Pakistan seperti halnya; Kingdome Arab Saudi dan Malaysia. Rana Aijaz Ahmad dan Abida Aijaz, "Commercialization of Religion in Pakistan," *Journal American International Journal of Contemporary Research*, Vol. 1, No. 2 (September 2011): 186-189.

⁴¹ Hakeem Onapajo, "Politics for God: Religion, Politics and Conflict in Democratic Nigeria", *the Journal of Pan African Studies*, vol.4, no.9, January 2012, 57-58. Lihat J.D.Y Peel, "The Politicisation of Religion in Nigeria Three Studies," *Journal of the International African Institute*, vol. 4, no. 66 (May 1996) 23-25.

⁴² Haidar Bagir, "Islam dan Politik: Indonesia Menuju Demokrasi Yang Lebih Baik", *Jurnal*, al-qurba vol 2 (2011): 1-13.

bahwa penegakan pemerintah tidak diperlukan sebuah konsep agama akan tetapi lebih bersifat rasional (kebutuhan).

Kedua, Steve Bruce dalam *God is Dead: Secularization in the West* mengemukakan bahwa, perkembangan kehidupan modern yang mengarah pada industrialisasi membawa pada perubahan sosial (*social changes*) yang serentak. Perubahan tersebut membuat agama kurang menarik dan kurang masuk akal dibandingkan dengan masa post-modern. Bruce menekankan adanya kebangkitan kembali teori sekularisasi yang seperti halnya diungkapkan Max Weber dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of capitalism* (1904) dan *Economic and Society* (1933). Sekularisasi merupakan sebuah proses yang panjang. Paradigma sekularisasi bukanlah sebuah konsep yang sederhana. Bruce menjelaskan proses sekularisasi itu dimulai dari reformasi protestan lalu turun kepada relativisme, pembagian dalam bagian-bagian dan kebebasan pribadi (*privatization*).⁴³

Ketiga, Robert Audi dalam bukunya *Religious Commitment and Secular Reason* menjelaskan bahwa, sekularisme diturunkan atas tiga prinsip, yaitu : kebebasan (*libertarian*), kesetaraan (*equality*), dan netralitas (*neutrality*). Prinsip netralitas menegaskan bahwa, negara harus mengambil sikap tidak memihak pada konsekuensi nilai-nilai agama dalam menjalankan roda-roda pemerintahan. Implikasinya, jika negara mengutamakan atau mengadopsi suatu agama tertentu (di antara beragam agama) untuk mengatur kehidupan bernegara, berarti negara itu telah melanggar satu prinsip dasar sekularisme. Inilah “politisasi agama”, yang dianggap menyimpang dari prinsip sekuler. Karena agama memang harus dipisahkan dari urusan politik.⁴⁴

Dalam kajian ini peneliti lebih cenderung pada kesimpulan penelitian Bruce, Robert dan Haidar yang lebih mengemukakan arti sekularisasi yang lebih luas dengan adanya kebangkitan kembali teori sekularisasi modern. Sekularisasi dalam arti yang lebih luas, sebuah konsepsi sosial terhadap politisasi SARA dalam setiap pemilu dan lebih pada dominasi kearifan konvensional—bentuk konkret dari keberhasilan kinerja calon kepala daerah—dalam menentukan pilihan rasional. Dikuatkan dengan munculnya teori sisi permintaan (*demand side theories*), ketika masyarakat terindustrialisasi, maka perilaku-perilaku religius perlahan akan terkikis, dan publik akan menjadi acuh tak acuh terhadap seruan spiritual.⁴⁵

⁴³ Steve Bruce, *God is Dead. Secularization in the West* (Oxford: Blackwell, 2002), 75-80.

⁴⁴ Robert Audi, *Religious Commitment and Secular Reason* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), 45-57.

⁴⁵ Lihat pippa noris 1 hal. 8.

***Rational Choice Theory* dalam Kerangka Keilmuan Modern**

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional (*rational choice theory*).⁴⁶ Teori pilihan rasional pertama dipopulerkan James Coleman pada akhir tahun 1980an dengan mendirikan Jurnal *Rationality and Society*. Pada tahun 1990 Coleman membukukan pemikirannya dalam *Foundations of Social Theory*.⁴⁷ Gaya pemikiran Coleman banyak dipengaruhi tentang teori Durkheim tentang faktor sosial sebagai penentu perilaku individu.

Pendekatan ini memunculkan cara-cara realistik dalam politik, seperti *voting* yang dilakukan dalam proses politik, metode-metode yang dilakukan secara lebih statis. Menurut penganut pandangan teori pilihan rasional, inti dari politik adalah individu sebagai aktor penting dalam dunia politik. Karena manusia (pemilih) adalah individu yang rasional, maka ia selalu memberikan hak-hak rasional sebagai pilihan dan ia pun mempunyai keharusan untuk menentukan pilihan sebagai upaya untuk memengaruhi isu sosial (*social issue*).⁴⁸

Pemilih dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Struktur pemilih yang demikian terdapat pada tingkat sosial masyarakat moderat dan elit. Pilihan politik yang mereka ambil bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya. Dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada pada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum.⁴⁹

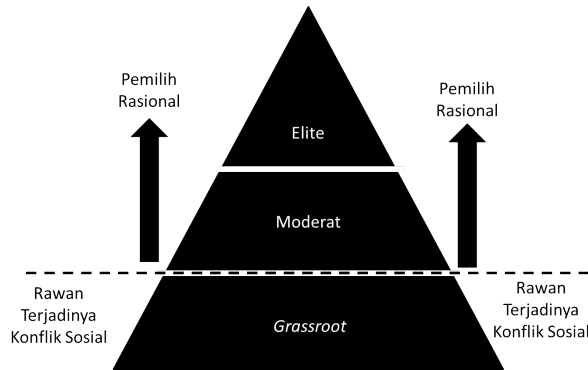
⁴⁶Sebenarnya Teori Pilihan Rasional diadopsi oleh ilmuwan politik dari ilmu ekonomi. Karena didalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

⁴⁷James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Harvard: Harvard University Press, 1990), 78-79.

⁴⁸Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 72.

⁴⁹Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), 146.

Bagan 1.1.
Struktur Sosial Masyarakat dalam Pendekatan Pilihan Rasional⁵⁰



Pengaruh isu yang ditawarkan bersifat situasional (tidak permanent) terkait erat dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan khususnya yang kontekstual dan dramatis. Sementara itu, dalam menilai seorang kandidat terdapat dua variabel yang harus dimiliki oleh seorang kandidat. Variabel pertama adalah kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat apabila ia kelak menang dalam pemilu. Variabel kedua adalah kualitas simbolis yaitu kualitas kepribadian kandidat yang berkaitan dengan integrasi diri, ketegasan, kejujuran, kewibawaan, kepedulian, ketaatan pada norma dan aturan dan sebagainya.⁵¹

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggali data dari lapangan—studi kasus penelitian melalui wawancara narasumber penelitian dan inventarisasi laporan-laporan lembaga survei yang berhubungan dengan judul penelitian.

Logika Elektoral vs Isu SARA

Penguatan isu-isu primordialisme dalam kehidupan berpolitik, merupakan bentuk dari kemunduran sistem politik di era demokrasi partisipatoris. Gaya politik tersebut lebih pada sistem politik yang menafsirkan bahwa proses politik adalah untuk memperoleh kekuasaan. Paradigma itu telah menghilangkan aspek edukasi dalam berpolitik bagi pemilih (*voter*). Lasswell dalam bukunya *Psychopathology and Politics*

⁵⁰ Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, 148.

⁵¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Bandung: CV. Remaja Karya, 1997), 45-50.

mengatakan bahwa, orientasi politik lebih banyak diartikan “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when and how*).”⁵² Gaya politik Lasswellian ini tepat untuk menggambarkan dinamika politik yang berkembang pada era reformasi.⁵³

Komunikasi politik dengan mengangkat isu SARA tidak hanya terjadi di Indonesia. Akan tetapi juga terjadi di negara-negara dengan modernitas peradaban sosio-politik yang lebih maju dan modern. Isu SARA memang tidak dapat dengan mudah dipisahkan dalam dinamika politik. Sebagian masih mempercayai bahwa isu SARA sebagai konten dalam komunikasi politik dan bahan untuk melakukan “pendekatan” atau “penyerangan” terhadap lawan politik. Namun pada kenyataannya, setiap kandidat atau elit politik di ruang publik akan berupaya terlihat menentang isu SARA. Akan tetapi di tingkat praksis, pengedepanan isu ini kerap dan tetap dilakukan, baik dengan atau tanpa sepengetahuannya. Situasi ini nampak seperti fenomena “*junk food*”, yang kerap dikritik namun dalam praktiknya tetap menjadi makanan yang digandrungi di berbagai belahan dunia.

Keterlibatan dan kebangkitan isu SARA hingga kini tetap menjadi komoditas politik. Bahkan di negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat maupun Prancis, isu primordialisme mulai bangkit pada ruang publik. Berkaca pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008, Barack Obama kerap dicecar oleh lawan-lawan politiknya karena latar belakang primordial, yang diperparah dengan nama tengahnya “Hussein”. Sementara di Prancis, adanya kekhawatiran berlebihan akan potensi kekuatan kaum imigran yang berpotensi meracuni “keadilan” budaya dan jati diri asli Prancis. Kekhawatiran tersebut menyebabkan sebagian politisi menjadikan isu makanan halal, menara masjid, hingga masalah higienitas pendatang Afrika, sebagai komoditas politik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Front National (FN) pimpinan Klan Le Pen.⁵⁴

Dalam konteks keindonesian, demokrasi tidak serta-merta menghapuskan sentimen SARA dalam kehidupan berpolitik. Kajian Baladas Ghoshal menunjukkan bahwa, berlangsungnya sistem demokratisasi justru akan menguatkan persoalan sentimen primordialisme – yang dulu ditutup rapat dengan cara-cara opresif dan represif oleh rezim otoriter –

⁵² Harold D. Lasswell, *Psychopathology and Politics* (Chicago: University of Chicago Press, 1930), 65.

⁵³ Harold D. Lasswell, *Psychopathology and Politics*, 89.

⁵⁴ Pippa Norris and Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (New York: Cambridge University Press, 2004), 36.

terbuka kembali dan menimbulkan efek negatif dalam era keterbukaan dinamika politik. Munculnya kembali isu SARA pada pelaksanaan Pemilu DKI Jakarta juga menjadi salah satu bukti efek suram dari sistem demokrasi partisipatoris di era kebijakan otonomi daerah. Hal ini mengingatkan bahwa DKI Jakarta merupakan parameter kebijakan politik nasional.

Tumbangnya Isu SARA dalam Masyarakat Modern

Dalam ketetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat tiga provinsi yang mendapat kebijakan otonomi khusus, yaitu: Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat. Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa yang dahulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum-1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia/Batauia, Jaccatra (1619-1942) dan Jakarta (1942-sekarang). Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan *J-Town*.⁵⁵ Wilayah DKI Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²). Pada 2012 penduduk DKI Jakarta berjumlah 9.761.407 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 106,15 (lihat tabel 4.1).⁵⁶

Jika ditinjau dari segi agama kepercayaan, penduduk DKI Jakarta yang memeluk agama Islam mencapai 8.200.796 dengan jumlah tempat peribadatan mencapai 67.21 persen. Sementara jumlah penduduk yang memeluk Kristen Protestan mencapai 724.232 dengan jumlah tempat peribadatan mencapai 22.92 persen. Lalu pemeluk Kristen Katolik mencapai 303.295 dengan jumlah peribadatan 1.03 persen dan agama lainnya (lihat tabel 4.2).⁵⁷

⁵⁵ Sebelum tahun 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah walikota ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat Satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Lihat Travel Indonesia Guide – How to appreciate the ‘Big Durian’ Jakarta”. Worldstepper-daworldisntenough.blogspot.com. 8 April 2008. Diakses 27 April 2010. Lihat

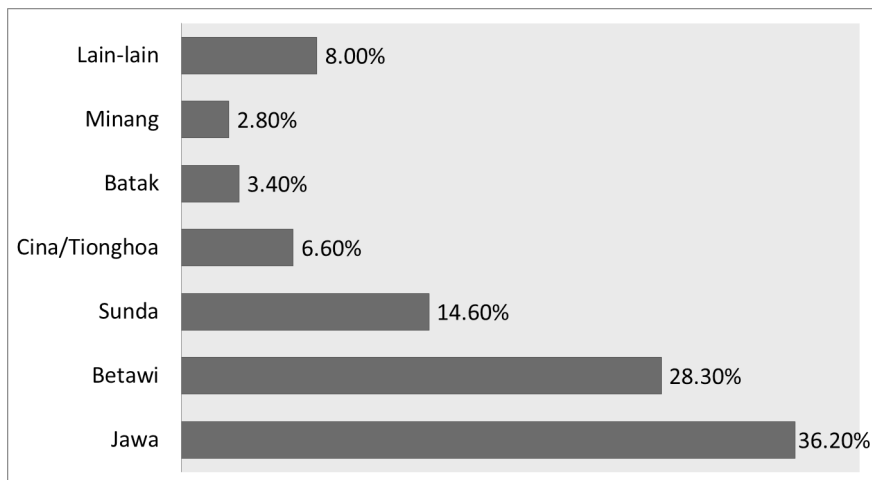
⁵⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, 2012.

⁵⁷ Jakarta dalam Angka 2010.

Tabel 4.1.
Populasi Penduduk DKI Jakarta pada Tahun 2012⁵⁸

Kabupaten/Kota Adm. <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Kelamin / <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	11 854	11 275	23 129	105,14
Jakarta Selatan	1 054 501	998 144	2 052 645	105,65
Jakarta Timur	1 423 261	1 341 603	2 764 864	106,09
Jakarta Pusat	542 784	518 555	1 061 339	104,67
Jakarta Barat	1 144 264	1 070 137	2 214 401	106,93
Jakarta Utara	849 725	795 304	1 645 029	106,84
Jumlah / <i>Total</i>	5 026 389	4 735 018	9 761 407	106,15

Grafik 4.1.
Etnis Penduduk DKI Jakarta 2012⁵⁹



⁵⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, 2012.

⁵⁹ Data Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, 2012.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Pada Kepercayaan Agama⁶⁰

Kab/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	KHC	Jumlah
Kepulauan Seribu	21,009	24	3	6	0	0	21,082
Jakarta Selatan	1,896,152	97,872	44,549	4,736	11,970	443	2,062,232
Jakarta Timur	2,416,360	190,137	57,330	4,511	12,312	603	2,693,896
Jakarta Pusat	752,465	76,784	30,195	3,481	29,035	538	902,973
Jakarta Barat	1,803,612	205,112	103,681	2,792	160,291	2,458	2,281,945
Jakarta Utara	1,311,198	154,303	67,537	4,838	103,919	1,292	1,645,659
Jumlah	8,200,796	724,232	303,295	20,364	317,527	5,334	9,607,787

Sebagai pusat ibu kota Indonesia, Jakarta mempunyai peranan yang sangat besar dalam memegang kendali pembangunan (politik, ekonomi dan sosial-budaya) bagi kebutuhan nasional.⁶¹ Dengan kemajuan di sektor pendidikan yang hampir 65 persen dari penduduk DKI Jakarta sudah menamatkan pendidikan wajib 9 tahun (SD, SMP dan SMA) dan 14.46 persen berpendidikan sarjana (lihat tabel 4.3). Kemajuan di sektor pendidikan akan berdampak pada pertumbuhan sumber daya manusia yang kompetitif.

Kemenangan PKS pada awal pemilihan langsung di Jakarta, memberikan koreksi terhadap meningkatnya pengaruh eksistensi nilai-nilai agama di tengah-tengah masyarakat modern. Penduduk DKI Jakarta merupakan pemilih rasional dengan tingkat pendidikan masyarakat yang memadai dan kemajuan informasi yang ditunjang melalui akses-akses teknologi. Artinya, kemenangan PKS di Jakarta pada Pemilu 2004, merupakan bentuk eksistensi dan revitalisasi politik Islam di tengah-tengah masyarakat yang plural dan moderat.⁶² Sejak PKS didirikan oleh aktivis kampus dan menjadi peserta pemilu, sudah mempunyai

⁶⁰ Data Sensus Penduduk 2010 - *Badan Pusat Statistik DKI Jakarta*.

⁶¹ Gerry Van Klinken dan Henk Schulte (ed), *Politik lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), 54-55.

⁶² Sebagian praktisi politik mengatakan, bahwa Pemilu 2004 adalah potret demokrasi setelah melewati masa transisi reformasi (Pemilu 1999). Lihat Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariaah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 34-35.

ladang simpatisan pemilih rasional, misalnya; kader-kader organisasi kemahasiswaan yang berideologi Islam.⁶³

Pada Pemilu 2004, di DKI Jakarta yang kebanyakan pemilihnya rasional, lebih memandang bahwa pada masa Orde Baru partai yang berasaskan nasionalisme dinilai gagal dalam menjalankan roda pemerintahan. Bentuk konkritnya adalah, melihat tingginya angka KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan kendaraan politik Partai Golkar – partai yang berasaskan nasionalis-pancasila.

Di sisi lain, partai-partai baru telah membaca peluang politik pasca lengsernya Presiden Soeharto dengan menawarkan “partai bersih anti korupsi.” Hal ini dinilai efektif untuk menarik simpatisan pemilih yang rasional dan sebagai identitas kalau bukan dari kelompok partai Orde Baru. PK (sebelum menjadi PKS) melalui jaringan dakwah kampus menjadikan jargon “partai bersih anti korupsi” di setiap lini politiknya. Di samping itu, PKS juga membidik kelompok-kelompok sosial menengah ke bawah yang merasakan dampak dari konspirasi politik Orde Baru yang berdampak pada krisis moneter 1997-1998.⁶⁴

Pada Pemilu 1999, sebagaimana daerah-daerah lainnya, suara pemilihan di Jakarta dimenangi oleh PDI Perjuangan. Kemenangan PDIP di DKI Jakarta, yang sebelum merupakan basis pemilih dan simpatisan Partai Golkar, tidak bisa dipertahankan pada Pemilu 2004.⁶⁵ Bahkan

⁶³ Peran politik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lebih moderat dan sekular. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS dan sebelumnya hanya Partai Keadilan “PK”) memainkan partai politik yang berasaskan Islam dan berbasis massa muslim. Hal ini sejalan dengan perjuangan HTI dan KAMMI dalam menhalan roda pergerakan kampus. PKS, lewat bidang Kepanduan dan Olahraga yang berada sejajar dengan bidang teritorial dan badan-badan lainnya di bawah presiden, telah mengembangkan berbagai organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai “sayap partai” yang berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan, organisasi pemuda Gema Keadilan, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS). Lihat Rahmat, Imdadun, *Ideologi politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Jakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008). Lihat Carrie Rosefsky Wickham, *Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt* (New York: Columbia University Press, 2002), 176.

⁶⁴ Burhanuddin Muhatadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, 45.

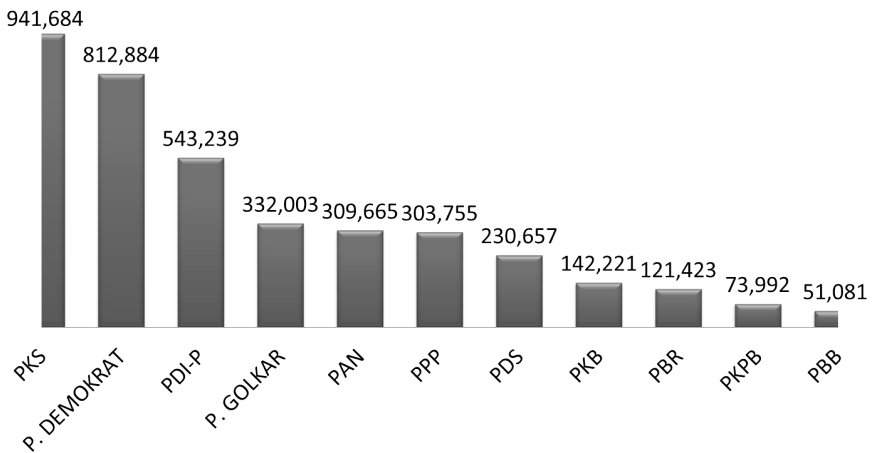
⁶⁵ Kejayaan Partai Golkar pada masa Orde Baru, manifestasi dari politik Presiden Soeharto. Beberapa penelitian tentang masa-masa kejayaan Partai Golkar menyimpulkan, bahwa kemenangan Partai Golkar pada pemilu sebelum era reformasi – ada kekuatan struktural di dalam pemerintahan Soeharto sampai pada tingkat kelurahan atau desa dengan menggunakan politik struktural birokrasi. Mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota sampai Kepala Desa mempunyai amanat untuk memenangkan Partai Golkar, sebagian

pada Pemilu 1999 hampir di seluruh daerah yang sebelumnya menjadi lumbung simpatisan Partai Golkar beralih dengan kemenangan partai lain. Perubahan geopolitik terjadi pada Pemilu 2004.

Iklim politik nasional dan Jakarta mengalami perubahan. Sebutan Jakarta sebagai barometer nasional mulai diragukan saat itu karena Partai Golkar yang menang secara nasional, di Jakarta hanya berada di urutan keempat dengan perolehan 332.003 (8.2 persen) suara. Sedangkan urutan pertama ditempati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 941.684 suara (23.34 persen), Partai Demokrat 812.884 (20.15 persen) dan PDI Perjuangan 543.239 (13.4 persen) [lihat grafik 4.3].

Grafik 4.3.

Data Perolehan Partai Politik pada Pemilu 2004 di Provinsi DKI Jakarta⁶⁶



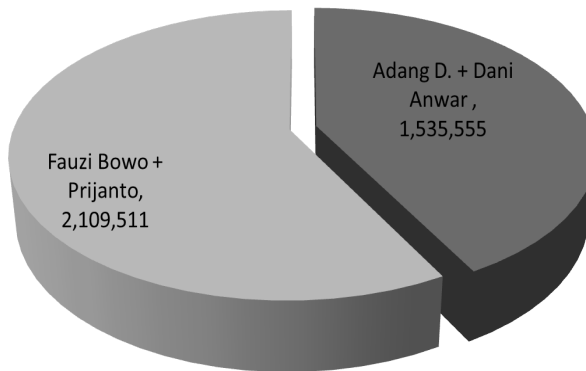
Kekuatan PKS dengan 22.32 persen mampu menjadi roda politik Adang Darajatun-Dani Anwar sebagai kendaraan tunggal tanpa membangun koalisi dengan partai lainnya. Pada Pemilu pada 2007, PKS menjadi musuh bersama (*common enemy*) saat mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar sebagai Cagub dan Cawagub yang berhadapan dengan Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto. Foke dan Prijanto membangun koalisi dengan 20 partai politik (Partai Demokrat (20.23 persen), PDIP (14.02 persen), Golkar (9.16 persen), PPP (8.16 persen), PAN (7.03 persen), PDS (5.34 persen),

menyebut dengan gerakan “kuningisasi”. Baca Wimanjaya K. Liotohe, *Prima Dosa Golkar: Memang Golkar Layak Bubur* (Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, 2001, 67-68. David Reeve, *Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System* (Oxford: Oxford University Press, 1985, 45.

⁶⁶ Laporan Rekapitulasi KPU DKI Jakarta, 2004.

PBR (2.90 persen), PBB (1.45 persen), maupun PKPB (1.83 persen dan partai non-parlemen lainnya) yang mengatasnamakan “koalisi Jakarta.”⁶⁷ Sintesa bahwa PKS sebagai *common enemy* seolah menemukan *justifikasi* paling nyata selama pelaksanaan pemilukada.⁶⁸ Dalam pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta 2007, pasangan Fauzi Bowo-Prijanto memperoleh 2.109.511 suara dan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh 1.535.555 dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 3.737.469 dan angka golput 1.981.002 (lihat grafik 4.4 dan tabel 4.5).

Grafik 4.4.
Rekapitulasi Pemilukada DKI Jakarta 2007⁶⁹



Pada Pemilukada 2007, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melangsir laporan survei yang menunjukkan 70 persen kecewa kepada pasangan Sutiyoso-Foke atas banjir yang melanda Jakarta. Sedangkan 90 persen kecewa karena kemiskinan meningkat, dan 80 persen kecewa karena naiknya angka pengangguran. Sementara Adang Daradjatun tidak terlalu dikenal prestasinya saat menjabat Wakapolri karena sebagian besarnya bertugas dibidang intelijen Polri sehingga memang tak terlalu dikenal.

⁶⁷ Burhanuddin Muhatadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, 45.

⁶⁸ Detik.com, 13 Partai Koalisi Jakarta Resmi Calonkan Fauzi Bowo-Prijanto <http://news.detik.com/read/2007/06/01/101554/788033/10/13-partai-koalisi-jakarta-resmi-calonkan-fauzi-bowo-prijanto?nd992203605> (diakses, 15/9/2013, 5:00 AM). Pernyataan sikap dukungan dan penandatanganan MoU dukungan kualisi untuk Fauzi Bowo Sambil proses penandatanganan dilakukan, teriakan-teriakan “Hidup Fauzi Bowo” membahana di lapangan Tugu Proklamasi, berbalasan dengan yel-yel “Hidup”. Acara kemudian ditutup dengan pembacaan doa oleh beberapa kyai dari NU dan partai-partai pendukung Koalisi Jakarta. “Ya Tuhan, berkatilah pasangan Fauzi Bowo-Prijanto, supaya memenangkan Pemilukada ini,” ujar seorang kyai.

⁶⁹ Diolah dari rekapitulasi hasil akhir KPU DKI Jakarta, 2007.

PKS sempat memberi penjelasan terhadap pencalonan Adang, “ memang tidak ada orang yang suci, *no body perfect*.”⁷⁰

Keputusan PKS mengusung Adang yang merupakan anggota kepolisian diharapkan mempunyai ketegasan dalam upaya mereformasi birokrasi pemerintahan DKI Jakarta yang lebih baik dalam menghadapi masalah perkotaan yang dihadapi. Misalnya; banjir, kemacetan, kemiskinan, pengangguran dan masalah perkotaan lainnya. Sedangkan Dani Anwar adalah mantan ketua fraksi PKS di DPRD, yang mempunyai gagasan perjuangan pendidikan gratis.⁷¹

Tabel 4.5.

Partisipasi Pemilih Terhadap Pelaksanaan Pemiluakada DKI Jakarta 2007⁷²

Uraian <i>Description</i>	Kabupaten/Kota Adim. <i>Regency/ Municipality</i>						DKI Jakarta
	Kep. Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Pilkada 2007							
2007 Regional Heads Election							
1. Menggunakan Hak Pilih <i>Use The Right To Vote</i>	11 846	823 031	1 103 884	429 349	799 671	569 888	3 737 469
2. Tidak Menggunakan Hak Pilih <i>Not Use The Right To Vote</i>	3 519	403 468	534 694	183 921	489 055	366 347	1 981 002
Jumlah / Total	15 165	1 226 497	1 638 578	613 270	1 288 726	936 235	5 718 471

Dinamika yang terjadi dalam proses Pemiluakada 2007, tak lepas dari sikap koalisi Jakarta yang menganggap PKS sebagai *common enemy*.⁷³ Regulasi politik terus berubah pada Pemiluakada 2012. Seperti pemiluakada sebelumnya, bahwa kekuatan partai politik dalam Pemiluakada 2012 diukur dari sejauhmana eksistensi partai politik dalam memperoleh simpatisan pemilih pada pemilu legislatif 2009. Pemilu 2009, Partai Demokrat (PD) memperoleh 36.40 persen suara, PKS 19.11 persen suara, PDI-P 11.63 persen suara dan Partai Golkar 6.46 persen suara (lihat tabel 4.6). Perbedaan

⁷⁰ Laporan Lembaga Survei Indonesia, 2007.

⁷¹ Burhanuddin Muhatadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, 49.

⁷² BPS DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka 2012, 2012.

⁷³ Burhanuddin Muhatadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, 58.

tersebut, tampak dari sikap pemilih Jakarta yang sudah lebih banyak belajar dari kinerja partai-partai parlemen—partai religion maupun nasionalis—pada pemilu sebelumnya. Sikap pemilih juga mencerminkan tidak adanya pengaruh dengan partai-partai yang berasaskan agama atau berbasis massa agama. Hal ini tampak pada tingginya isu agama dengan kuatnya koalisi partai agama tidak mampu mendongkrak simpatisan pasangan kepala daerah yang diusungnya.

Tabel 4.6.

Empat Besar Partai Pemenang Pemilihan Legislatif 2009 di DKI Jakarta (%)⁷⁴

Kabupaten/ Kota Adm Regency/ Municipality.	Nama Partai / Name of Party					Jumlah Total
	Partai Demokrat	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Partai Golongan Karya	Partai Lainnya Other Parties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	34,23	20,52	9,47	6,23	29,55	100,00
Jakarta Selatan	34,23	20,52	9,47	6,23	29,55	100,00
Jakarta Timur	37,80	19,91	9,79	6,79	25,71	100,00
Jakarta Pusat	34,82	17,15	11,97	5,14	30,92	100,00
Jakarta Barat	36,58	15,69	14,49	5,67	27,57	100,00
Jakarta Utara	38,21	21,97	14,10	7,96	17,76	100,00
DKI Jakarta	36,40	19,11	11,63	6,46	26,40	100,00

Sumber / Source : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Pada Pemilukada DKI Jakarta 2012, terdapat enam pasangan dari koalisi partai dan independen dengan latar belakang agama dan etnis yang berbeda, yaitu: *Pertama*, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (dengan sebutan Foke-Nara) dukungan partai : Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). *Kedua*, Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria (Hendarji-Riza), calon independen.

Ketiga, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai

⁷⁴ BPS DKI Jakarta, Jakarta Dalam Angka 2012, 2012.

Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). *Keempat*, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini (Hidayat-Didik) dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pengusung tunggal. *Kelima*, Faisal Batubara-Biem Triani Benjamin (Faisal-Biem) melalui jalur Independen (Calon Perseorangan). *Keenam*, Alex Noerdin dan Nono Sampono (Alex-Nono) yang didukung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS) dan beberapa partai non-parlemen.

Perbedaan agama dan etnis dari pasangan kepala daerah tersebut, membangkitkan kembali isu SARA, seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah lain, misalnya Papua. Demokrasi dengan kemajuan dinamika politik, ekonomi dan sosial-budaya, masih menjadikan isu primordialisme sebagai hal yang sakral dalam berpolitik. Semestinya tidak terbatas hanya politik, isu SARA juga terjadi pada sisi perekonomian dan lain sebagainya.⁷⁵ Akan tetapi, dengan hadirnya kandidat dari etnis Tionghoa, menjadi bantahan atas hipotesis sebagian orang yang menyatakan masih adanya diskriminasi politik terhadap etnis minoritas (lihat tabel 4.7).⁷⁶

Tabel 4:7
Komposisi Etnis Kandidat Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 (Putaran I)

No	Kandidat	Etnis	Agama
1	Fauzi Bowo	Betawi	Islam
	Nachrowi Ramli	Betawi	Islam
2	Hendarji Supandji	Jawa	Islam
	Ahmad Riza Patria	Banjar	Islam
3	Joko Widodo	Jawa	Islam
	Basuki Tjahya Purnama	Tionghoa/Cina	Kristen
4	Hidayat Nurwahid	Jawa	Islam
	Didik Junaidi Rachbini	Madura	Islam
5	Faisal Basri	Batak	Islam
	Biem Benjamin	Betawi	Islam
6	Alex Noerdin	Tionghoa	Islam
	Nono Sampono	Madura	Islam

[ket: nama pasangan kandidat yang diberi huruf tebal (*bold*) merupakan pasangan yang lolos pada putaran kedua]

⁷⁵ Misalnya; konflik sosial-ekonomi antara muslim pribumi dengan etnis Cina di Kudus pada tahun 1918. Baca Masyhuri, *Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudus Tahun1918* (Jakarta: Pensil 324, 2006).

⁷⁶ Masyhuri, *Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudus Tahun1918*. 98.

Keterlibatan dua kandindat (Hendardji-Riza dan Faisal-Biem) dari jalur perseorangan (*independent*) dalam Pemilu pada DKI Jakarta 2012, memberikan arti tersendiri terhadap pemahaman politik masyarakat serta menjadi pembeda dengan pemilu pada sebelumnya (2007). Dengan hadirnya calon independen, masyarakat semakin mempersempit ruang koalisi partai dan memberikan ruang kepercayaan terhadap kandidat secara langsung. Dukungan kepada calon independen berupa penyerahan sukarela *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bentuk dukungan pendaftaran bagi calon perorangan.⁷⁷

Dalam pelaksanaannya, Pemilu pada DKI Jakarta 2012 tidak lepas dari sentimen dan kembalinya isu SARA dalam ranah politik. Sentimen tersebut terjadi karena Ahok yang merupakan wakil dari Jokowi beragama kristen dan keturunan etnis Tionghoa. Komunikasi politik dengan mengangkat kembali isu SARA menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Jakarta. Terlebih dari kampanye SARA yang dipandang negatif, atau upaya lain untuk menjadikan kandidat kepala daerah yang didukung berbeda dengan kandidat lainnya. Pelaksanaan pemilu pada tidak selesai pada putaran pertama dan berlanjut pada putaran kedua sebagai babak penentu. Pelaksanaan pemilu pada putaran kedua yang diselenggarakan pada 20 September 2012 dan diikuti oleh pasangan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok. Peta dukungan politik pun mengalami perubahan.

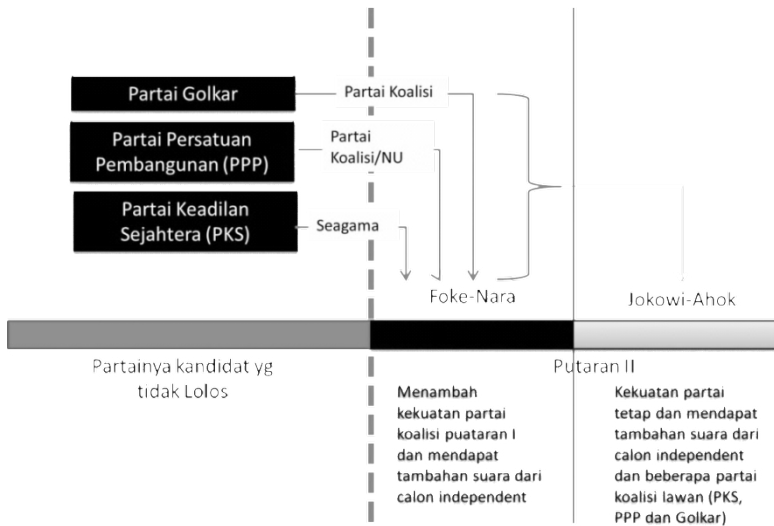
Peta dukungan partai politik pun mengerucut pada pasangan Foke-Nara. Dimana secara resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalihkan dukungannya dan bergabung dalam koalisi pasangan Foke-Nara. Pada putaran pertama Partai Golkar dan PPP menjadi kendaraan politik Alex-Nono dan PKS sebagai kendaraan politik Hidayat-Didik. Merapatnya tiga partai tersebut karena Foke mempunyai hubungan baik dengan DPP Golkar dan PPP sebagai rival koalisi PD di tingkat nasional. Alasan tersebut berbeda dengan PKS. Dukungan PKS kepada Foke-Nara karena dianggap keduanya merupakan kandidat yang seagama (muslim). Pertimbangan politik PPP mendukung Foke-Nara dalam putaran kedua selain karena sama-sama partai koalisi di tingkat nasional, juga Foke yang merupakan pengurus DPW NU DKI Jakarta mempunyai kedekatan dengan PPP sama-sama dari golongan Nahdliyin (lihat grafik 4.5).

Bergabungnya tiga partai tersebut menambah kekuatan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang semula mendapat dukungan dari partai politik utama yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional

⁷⁷ Wawancara Ridwan Saidi (Budayawan dan Tokoh Betawi di DKI Jakarta), 32 Agustus, 2013.

(PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Sementara pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama masih dengan kekuatan partai pendukung utama yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

Bagan 4.1.
Alur Dukungan Partai Politik dalam Pemilukada DKI Jakarta pada Putaran Kedua⁷⁸



Beberapa lembaga survei, di antaranya: Lembaga Survei Indonesia [LSI], Indo Barometer, Media Survei Nasional [Median] dan Jaringan Survei Indonesia [JSI], telah memprediksi bahwa pasangan Foke-Nara akan mendapat suara yang signifikan dibandingkan Jokowi-Ahok. Prediksi tersebut pastinya berdasarkan kekuatan partai politik Foke-Nara. Namun, dibalik kekuatan koalisi politik Foke-Nara, PDIP dan Gerindra telah membangun kekuatan dengan mengangkat nilai-nilai kefiguran yang memang menjadi aspirasi masyarakat perkotaan-moderat. Memainkan gaya komunikasi *face to face* (verbal maupun non-verbal) atau yang lebih populer dengan sebutan blusukan. Pasangan Jokowi-Ahok memainkan

⁷⁸ Diolah dari berbagai sumber, di antaranya; LSI, Kompas, Indopos, Koran Jakarta dan lain-lain.

politik dengan pendekatan kelompok masyarakat pinggiran dan kumuh yang jarang disentuh partai koalisi Foke-Nara.⁷⁹

Meskipun tidak menjadi ukuran yang sangat valid, setidaknya Pemilukada Provinsi DKI Jakarta menjadi parameter elektabilitas figur politik yang tengah memberikan dukungan kepada kandidat. Figur-figur politik utama seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, M. Jusuf Kalla, Anas Urbaningrum, M Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra, Sutiyoso dan lainnya.

Pemilukada DKI Jakarta memberi efek *media relation* yang sangat masif terhadap seluruh dinamika politik dengan menjadi penilaian masyarakat terhadap figur-figur politik yang tengah membangun elektabilitas politik nasional. Terlihat dari dukungan koalisi partai politik yang mendukung Joko Widodo, PDI-P dan Partai Gerindra yang hanya memiliki 17 persen suara pada Pemilu 2009. Akan tetapi Jokowi mampu mendulang suara pada putaran kedua sebesar 45.52 persen.⁸⁰ Sangat jauh dengan yang terlihat pada prosentase yang didapat Hidayat Nur dan Alex Noerdin. Hidayat Nur Wahid ternyata hanya mendapat sekitar separuh dukungan partai sedangkan Alex Noerdin hanya mendapat 35 persen dukungan partai yang mengusungnya.⁸¹

Pada Pemilu Legislatif 2009 di DKI Jakarta, Partai Demokrat mendapatkan 35.03 persen suara dan PKS memperoleh 18.39 persen suara. Tetapi pada Pemilihan Gubernur DKI 2007, terlihat bahwa massa **18.38 persen dari Pemilu 2007**, hanya **9.75 persen suara** yang memilih pasangan Hidayat-Didik diusung PKS. Melihat dari perolehan suara 9.75 persen, berarti hanya ada 53 persen dari massa PKS pada Pemilu 2009 yang memilih pasangan Hidayat-Didik. Yudi Widiana (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera) berpendapat bahwa, dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012, pemilih di Jakarta lebih tertarik pada sosok kepribadian (*personality*) kandidat dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (misalnya; keagamaan, kesukuaan atau keetnisan).⁸²

Pada hal seperti yang diketahui masyarakat secara umum, Hidayat Nur Wahid adalah Pendiri PKS dan dapat dikatakan sebagai **ikon PKS**

⁷⁹ Wawancara Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani "LIMA" di Jakarta), 24 Maret, 2013.

⁸⁰ Rekapitulasi KPU DKI Jakarta, diakses dari website resmi <http://kpujakarta.go.id> (diakses 25/10/13, 9:47 PM)

⁸¹ Husin Yazid, *Kenapa Foke & Jokowi? Data dan Analisa Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta : Berebut Kursi Jakarta Satu* (Jakarta: Firdaus, 2012), 34-35.

⁸² Wawancara Yudi Widiana (DPP PKS di Jakarta), 24 Maret, 2013.

seperti halnya Megawati di **PDIP** atau Susila Bambang Yudhoyono di **Partai Demokrat**. Jadi kesimpulan kader atau konstituen memilih personal calon merupakan alasan yang lemah karena sudah seharusnya Hidayat Nur Wahid sebagai figur utama dan memiliki sosok personal calon yang akan dipilih massanya. Pada putaran pertama Pemilukada DKI Jakarta pasangan Jokowi-Ahok memperoleh 1.847.157 suara mengungguli pasangan lainnya (lihat tabel 4.8).

Tabel 4.8
Perolehan Suara Penghitungan KPU Dalam Pemilukada 2012
(Putaran Pertama)⁸³

No	Calon Kepala Daerah	Perolehan Suara
1	Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli	1.476.648 (33,57 persen)
2	Hendarji Supandji-Ahmad Riza Patria	85.990 (1,98 persen)
3	Joko Widodo- Basuki Tjahya Purnama	1.847.157 (42,6 persen)
4	Hidayat Nurwahid-Didik Junaidi Rachbini	508.113 (11,72 persen)
5	Faisal Basri-Biem Benjamin	215.935 (4,98 persen)
6	Alex Noerdin-Nono Sampono	1.643 (4,67 persen)

Kesimpulan

Pada pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta 2012, secara statistik kesimpulan penelitiannya Marcus dan Mackuen terbukti, bahwa kecemasan tidak terkait langsung dengan pilihan politik. Akan tetapi, pemilih yang merasa cemas cenderung melihat kembali informasi-informasi kampanye terlebih dahulu sebagai sumber pertimbangan. Kebanyakan para pakar atau pengamat politik yang menjadi referensi wawancara dalam penelitian ini, menggolongkan pemilih di Jakarta merupakan pemilih rasionalitas.

Di lain pihak, emosi antusias justru akan memantapkan pilihan politik pemilih terhadap kandidat tertentu. Tema perubahan akan “Jakarta Baru” yang dikampanyekan Jokowi-Ahok melalui iklan politik, *games* dan *flashmob* ternyata mampu memancing kecerdasan dan antusiasme pemilih Jakarta dalam menentukan sikap pemilih pada putaran kedua. Hal ini pastinya sikap pemilih lebih memandang nilai-nilai kefiguran

⁸³ Hasil Rekapitulasi KPU DKI Jakarta, 2012.

(kearifan konvensional) dari pada isu SARA yang tambah membuat kecemasan dan menimbulkan umpan balik (*feedback*) terhadap rasionalitas pemilih dan membangun citra negatif yang berdampak pada rusaknya citra politik dirinya sendiri (*self destruction*).

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Oemi. *Dasar-Dasar Public Relation*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adam, Rainer. *Masa Depan Koalisi Ada di Tengah*. Jakarta: Frederich Naumman Stiftung, 2007.
- Arrianie, Lely. *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2010.
- Anwar, Dewi Fortuna, dkk. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Assayukanie, Lutfie. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Atkinson, Jane Monnig, "Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion, dalam Susan Rodgers dan Rita Smith-Kipp (eds.), *Indonesian Religions in Transition*. Tucson: University of Arizona Press, 1987.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Grafindo, 1997.
- Al-Maududi, Abdul A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- _____. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Karisma, 2007.
- _____. *Politik Alternatif*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.
- _____. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin (ed). *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu 99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: Alvabert, 1999.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LkiS, 2000.

- Bertrand, Jacques. *Nationalisme and Ethnic Conflict in Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Berger, Arthur Asa. *Signs in Contemporary Culture: an Introduction to Semiotics*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Beilharz, Peter. *Teori-teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Benda, J. Harry. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Casanova, Jose. *Public Religions in the Modern World*. USA: The University of Chicago Press, 1994.
- Calhoun, C. ed. *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, Mass: MIT Press, 1992.
- Castles, Lance. *Religion Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarrete Industry*.
- Choirie, Effendy. *Islam-Nasionalisme: UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Pensil 324, 2008.
- Danial, Akhmad. *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*. Jakakarta: YADAUL, 2006.
- Duerkheim, Emile. *The Elemenatary Forms of The Religious Life* Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
- Davis, Keith. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill, 1977.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Tranformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina dan LSI, 2009.
- _____. *Agama Publik dan Privat: Pengalaman Islam Indonesia*. Jakarta: UIN Press, 2009.
- Ellewein, Warsito. dkk. *Memperbesar Peluang Calon Memenangkan Pilkada*. Jakarta: Frederick Naumman Stiftung, 2010.
- Esposito, Jhon (ed). *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Eley, G. "Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century," in Craig Calhoun, ed., *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, Mass: MIT Press, 1992.
- Fraenkel, R. Jack, and Norman E. Wallen. *How To Design And Evaluate Research In Education*. Singapore: McGraw-Hill, 2008.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Gaus, Ahmad AF. "Api Islam," Nurcholish Madjid. *Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Glover, Terrot Reaveley. *The Pilgrim: Essay on Religion*. New York: George H. Doran Company, 2006.
- Habermas, J. *Themes in post-metaphysical thinking* (W. Hohengarten, Trans.). In *Post-metaphysical thinking: Philosophical essays* (hal. 28-57). Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
- _____. *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Translated by T.McCarthy. Boston, MA: Beacon Press, 1984.
- Haris, Peter dan Ben Reily. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Diterjemah oleh LP4M. Jakarta: International IDEA, 2000.
- Hasan, Sahar L, dkk. *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hofmann, Murad W. *Religion on the Rise: Islam in the Third Millennium*. Maryland: Amana Publications, 2001. Abdullah Ali, *Bangkitnya Agama: Ber-Islam di Alaf Baru*. Jakarta: Serambi, 2003.
- Hiro, Dilip. *Between Marx and Muhammad the Changing Face of Central Asia*, M. Khoirul Anam, *Pertarungan Marxisme-Islam*. Depok: Inisiasi Press, 2005.
- Hidayat TZM. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1977.
- Hilmy, Masdar. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Ibnu Taimiyah. *al Siyasa al Syar'iyah*. Bairut: Darul Fikr, 1976.
- Ismail, Faisal. *Percikan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1999.
- Innayatulah, Benny. *Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan*. Jakarta: The Indonesia Institute, 2008.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kamil, Syukron. *Islam dan Politik di Indonesia Terkini: Islam dab Begara, Dakwah dan Politik, HMI, Ati-Korupsi, Demokrasi, NII, MMI dan Perda Syariah*. Jakarta: PSIA UIN Jakarta, 2013.

- Karim, M. Abdul. *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Perjuangan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI*. Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005.
- Kompridis, N. *Critique and Disclosure: Critical Theory between Past and Future*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006.
- Klinken, Gerry Van dan Henk Schulte (ed). *Politik lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Leege, David C. and Lyman A. Kellstedt. *Rediscovering The Religious Factor in American Politics*. America: ANSI, 1993.
- Liddle, R. William. *Islam, Politik dan Modernitas*. Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Leege, David C and Lymant A. Kellstedt (eds). *The Global Resurgence of Democracy*, eds. Larry Diamond and Marc F. Plattner, Baltimore an London: The Johns Hopkins University Press, 1996.
- Liotohe, Wimanjaya K. *Prima Dosa Golkar: Memang Golkar Layak Bubar*. Jakarta: Yayasan Eka Fakta Kata, 2001.
- Marbun, B. N. *Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Masmiyat, Andi. *Konflik SARA: Integrasi Nasional Terancam I*. Jakarta: Pensil 324, 2007.
- Masyhuri. *Bakar Pecinan: Konflik Pribumi vs Cina di Kudus Tahun 1918*. Jakarta: Pensil 324, 2006.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Muhtadi, Asep Saeful. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3S, 2004.
- Muchtadi, Yon. *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. Australia: ANU Press, 2008.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nadir, Ahmad. *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi Studi atas artikulasi Politik Nahdiyyin dan Dinamika*. Malang: Averroes Press, 2005.

- Nurhasim, Moch. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Noer, Deliar. *Islam dan Politik*. Jakarta. Yayasan Risalah, 2003.
- _____. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. London: Oxford University Press, 1973.
- Noris, Pippa and Ronald Inglehart. *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Pals, L. Daniel. *Eight Theories of Religion*. Lahore: Oxford Universty Press, 1996.
- Pardoyo. *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1993.
- Pruit G, Dean dan Rubin Z, Jeffrey. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004.
- Praja, J. S. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Posen, Barry, "The Security Dilemma and Ethnic Conflict," dalam *Survival*, 35, No. 1 (1993), 27-47.
- Rahman, Budhy Munawar. *Islam dan Liberalisme*. Jakarta: Frederick Naumman Stiftung, 2011.
- Ramayuli. *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Rasjidi, H.M., *Koreksi terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang Sekularisme*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Reeve, David. *Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System*. Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Romli, Mohamad Guntur. *Islam Tanpa Diskriminasi: Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin*. Jakarta: Rehal Pustaka, 2013.
- Rosefsky Wickham, Carrie. *Mobilizing Islam: Religion, Activism and Political Change in Egypt*. New York: Columbia University Press, 2002.
- Ryan, M.P. "Gender and Public Access: Women's Politics in Nineteenth-Century America," in Craig Calhoun, ed., *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992.
- Salim, Agus. *Perubahan Sosial sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wicana Yogya, 2004.
- Salim, Arsekal. "Partai Islam dan Relasi Agama-Negara, dalam Benny Innayatullah, *Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan*. Jakarta: Laporan tahunan The Indonesia Institute. 2008.
- Send, Krishna and David T. Hill. *Culture and Politics in Indonesia*. Victoria: Oxford University Press, 2005.

- Schröder, Peter. *Strategi Politik*. Jakarta: Frederick Naumman Stiftung, 2003.
- Sukardiyono, K dan Dadi M. H. Basri. *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Subagyo, Hari dkk. *Konstituen Pilar Utama Partai Politik*. Jakarta: Frederick Naumman Stiftung, 2011.
- Solihin, M. *Perkembangan Pemikiran Filsafat Dari Klasik Hingga Modern*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- S, Kirbiantoro dan Dedy Rudianto. *Pergulatan Ideologi Partai Politik di Indonesia*. Jakarta : Intimedia Publisher. 2009.
- Sulistyo, Hermawan. *Lawan: Jejak-Jejak Jalanan Pasca Runtuhnya Soerharto*. Jakarta: Pensil 324, 2008.
- Sukanto. *Dari Jayakarta ke Jakarta: Sejarah Ibukota Kita Jakarta*. Jakarta: Gramedia, 1984.
- Steenbrink, Karel A. *Dutch Clonialisme and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts, 1596-1950*, Amsterdam/ Atlanta, GA: Rodopi, 1993.
- Syahab, Ali. *Agama Politik: Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra, 2006.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Said, Muhammad. *Al-Islâm al-Siyâsî*. Lebanon: Sina lil-Nashr; al-Tabah, 1987.
- Taylor, Charles, *Multiculturalism and The Politics of Recognition: An Essay*. NJ: Princeton University Press, 1992.
- Tibi, Bassam. *The Challenge Of Fundamentalism: Political Islam and The New World Disorder*. London: Universty Of California Press, 1998.
- Tafsir, Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik: Nalar Politik Islam (ter)*. Jakarta: Citra, 2006.
- Yazid, Husin. *Kenapa Foke & Jokowi? Data dan Analisa Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta : Berebut Kursi Jakarta Satu*. Jakarta: Firdaus, 2012.
- Yusuf, Muhammad Musa. *Nizam al-Hukm fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Kitab, 1963.
- Weber, Max. 2012. *The Elementary Forms of The Religious Life*. (Terj Yudi Santoso). Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Wertheim,W,F. *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wicana, 1999.

- Wisesa, Silih Agung. *Political Branding & Public Relations: Saatnya Kampanye Sehat, Hemat dan Bermartabat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Zainuddin, R. *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi*. Jakarta: Pensil 324, 2004.
- Zahra, Abu (ed). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Zakaria, Fareed. *The Future of Freedom: Liberal Democracy at Home and A Broad*. New York and London: W.W. Norton & Company, 2003.